



DINAMIKA POLITIK KYAI DALAM PROSES DEMOKRATISASI LOKAL PADA PILKADA PAMEKASAN

Abdullah Achmad Madani

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Masyarakat Madani

Email: abduhmadani06@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu keinginan untuk mengetahui dan menggambarkan dinamika kekuasaan kyai dalam proses demokratisasi lokal (pilkada). Selanjutnya permasalahan yang timbul adalah mengapa kekuasaan kyai sepuh menurun dalam pilkada Pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan agar peneliti dapat memperoleh gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta dan sifat objek penelitian. Sehingga diharapkan menjawab rumusan masalah yang ada. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode wawancara yang berpedoman pada Interview Guide (Pedoman wawancara), dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* Masyarakat Pamekasan tidak lagi terdominasi oleh kekuatan dan kekuasaan politik kyai sepuh serta tidak lagi patuh, tunduk dan mendukung atas apa yang di kehendaki dan harus sesuai dengan pilihan kyai. *Kedua* Masyarakat Pamekasan telah memiliki pilihan politik sendiri sebagai bentuk keberaniannya dalam memprotes kebijakan dan kepemimpinan politik kyai sebelumnya yang sedang mendapatkan sorotan dan kritikan dalam kebijakan dan tindakannya yang hanya berafiliasi pada kekuasaan, jabatan, uang maupun materi (proyek).

Kata Kunci: Kyai, Politik, Pilkada

Abstract: This research is motivated by a desire to know and describe the dynamics of kyai power in the local democratization process (pilkada). The next problem that arises is why the power of the elderly kyai decreased in the Pamekasan regional elections. This research uses descriptive qualitative research, which aims to enable researchers to obtain a systematic, current and accurate picture of the facts and nature of the research object. So it is hoped that it will answer the existing problem formulation. Meanwhile, the data collection technique used by researchers is the interview method which is guided by the Interview Guide, documentation and



observation. The results of the research show that, firstly, the Pamekasan community is no longer dominated by the political power and authority of the elderly kyai and is no longer obedient, submissive and supportive of what they want and must be in accordance with the kyai's choices. Both Pamekasan people have had their own political choices as a form of courage in protesting the policies and political leadership of previous kyai who are currently receiving attention and criticism for their policies and actions which are only affiliated with power, position, money or material (projects).

Keywords: Kyai, Politic, Pilkada

Pendahuluan

Tulisan ini bermaksud untuk Mengungkap fenomena Pudarnya Dominasi Politik Kyai dalam Proses Demokratisasi Lokal Pilkada Pamekasan. Istilah kyai yang digunakan dalam studi ini merujuk pada gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan dalam sebuah pesantren dan mengajar kitab-kitab kuning maupun klasik kepada para santrinya (Dhofier 1982 ; 55). Namun cakupan makna kyai dalam penelitian ini bukan hanya pada seseorang yang menjadi pimpinan dalam sebuah pesantren dan mengajar kitab kuning saja tetapi juga merupakan salah satu tokoh elit dalam masyarakat yang memiliki pengaruh serta menjadi panutan dan teladan bagi pengikut dan masyarakat disekitarnya.

Berbicara tentang kyai tidak bisa dilepaskan dari santri dan pesantren sebagai satu- kesatuan yang utuh dan berkesinambungan. Kyai, santri dan pesantren merupakan komponen dalam dunia pendidikan Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Pamekasan (Madura). Oleh karena itu tidak berlebihan jika kiranya kemudian ketokohan dan pengaruh kyai sangat besar dan mengakar dalam masyarakat. Kuntowijoyo menyebut Madura adalah "Pulau Seribu Pesantren" (Muthmainnah. 1998) karena didalamnya terdapat beberapa kyai, begitu juga di Pamekasan. Sebagai kabupaten yang syarat dengan pesantren, kehadiran kyai ditengah-tengah kehidupan masyarakat sangat diharapkan, selain untuk menjaga eksistensi keagamaan dan memperbaiki tata kehidupan dalam sosial masyarakat, ia juga dijadikan referensi dalam berbagai ranah kehidupan.

Penyebutan istilah kyai bagi masyarakat Pamekasan beraneka ragam. Jika pada umumnya kyai merupakan gelar bagi pengasuh pondok pesantren, namun dalam konteks Pamekasan berbeda. Kyai tidak hanya orang yang menjadi pengasuh di dalam pondok pesantren, tetapi juga bagi orang yang memiliki surau (*langger*), madrasah, masjid dan murid (santri) serta memiliki kemampuan penguasaan ilmu dalam bidang agama Islam yang kuat. Perbedaan penyebutan tersebut terletak pada tingkatan dan pengaruhnya dalam sosial masyarakat. Yang *pertama* Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang agama Islam serta mempunyai surau (*langger*), madrasah atau masjid sebagai tempat aktivitas belajar mengajar disebut *mak kaeh*, (kyai). *Kedua* orang yang mempunyai santri dan pondok pesantren sebagai tempat belajar mengajar serta status dan kedudukannya dituakan, menjadi induk dan referensi bagi masyarakat dan



pesantren lainnya *kyai sepuh*.

Keberadaan kyai sepuh ini sangat menentukan dan memiliki pengaruh yang kuat serta kuasa yang hegemonik dalam kehidupan sosial masyarakat Pamekasan. Setiap kata, perbuatan dan perintahnya harus diikuti dan dipatuhi, ketidaktundukan merupakan suatu hal yang dianggap salah dan keliru (*kualat, bala*) hingga menimbulkan kekhawatiran tidak mendapatkan berkah atau barokah.

Dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, Kyai sebagai tokoh pesantren sering kali menjadi lahan dan sasaran bagi para politisi untuk membangun basis dukungan politiknya. Suara kyai selalu diperebutkan, bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kyai, banyak partai politik yang menempatkan kyai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai bahkan hingga dijadikan calon Legislatif, Gubernur, maupun Kepala daerah (Bupati) dengan harapan bisa menjadi *vote getter* dan daya tarik dalam kemenangan pemilu.

Pamekasan dikenal dengan kabupaten *gerbang salam*¹, karena aktivitas masyarakat sehari-hari selalu disandarkan pada nilai-nilai keagamaan dengan mentaati, mematuhi dan tunduk terhadap perintah kyai sebagai panutan mereka dalam masyarakat. Kehidupan sosio-politik yang terbangun dalam diri orang madura tidak terlepas dari kultur sosial kemasyarakatannya yang berkembang. Umumnya orang Madura khususnya Pamekasan terdapat tiga ajaran ketundukan dan kepatuhan, yakni : *Ibuh* (kedua orang tua), *Guruh* (guru), dan *Ratuh* (pemerintah) (Muthmainnah. 1998). Guru yang dimaksud disini adalah pemuka dan pemimpin agama Islam (Kyai). Hal tersebut pada akhirnya sangat mempengaruhi pada afiliasi politik mereka. Karena sifat fanatik dan kepatuhannya kepada kyai yang sangat tinggi hingga berimbas pada proses kepartaian.

Pengaruh dan kedudukan kyai dalam kehidupan masyarakat Pamekasan sangat besar, kuat dan mengakar. Tidak hanya dalam kehidupan sosial-keagamaan, melainkan juga dalam kehidupan social-politik. Pengaruh sosok kyai dalam politik sangat besar, melebihi partai Politik. Sehingga perbedaan partai yang dianut oleh kyai yang satu dengan kyai yang lainnya membuat masyarakat menjadi bingung dalam menentukan sikap politiknya. Kyai memiliki basis dukungan yang tetap yaitu para masyarakat khususnya para santri yang akan selalu menghormati, memuliakan dan akan selalu mematuhi perintahnya. Salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan tersebut adalah dengan cara *ngerengah debunah keyaeh*.

Kyai terjun kedalam dunia politik praktis bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Secara historis keterlibatan kyai dalam politik sudah terbukti sejak zaman penjajahan, orde lama, orde baru, maupun pasca reformasi seperti saat ini semakin marak kyai terjun langsung kedalam politik praktis, baik secara langsung maupun dengan turut serta menjadi tim sukses dalam kemenangan calon yang diusung. Terbukti dalam beberapa preode faktor dukungan kyai sering kali menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan, karena kyai merupakan elemen yang paling sesensial dalam masyarakat lebih-lebih dalam dunia pesantren.



Namun seiring dengan perkembangan waktu, paradigma ketundukan dan kepatuhan yang tertanam dalam kehidupan dan kepribadian masyarakat terhadap kyai sepuh mengalami perubahan, di mana ketundukan santri terhadap kyai mengalami anomali. Santri tidak lagi terdominasi oleh kekuatan dan kekuasaan kyai serta tidak lagi patuh, tunduk dan mendukung apa yang di kehendaki dan dilakukan kyai. Paradigma *sami`na wa atho`na* yang sudah terbentuk dan melekat kini berubah menjadi *sami`na wa analisa*.

Pilkada Pamekasan tahun 2013 menunjukkan peran besar kyai hilang *kemujarabannya*. Ketundukan dan kepatuhan masyarakat dalam politik terhadap kyai sepuh yang awalnya menjadi induk dan corong bagi pesantren dan masyarakat Pamekasan mengalami perubahan. Masyarakat Pamekasan tidak lagi terdominasi oleh kekuatan dan kekuasaan sang kyai sepuh serta tidak lagi patuh, tunduk dan mendukung atas apa yang di kehendaki dan didukung. Paradigma *sami`na wa atho`na* (kami dengar dan kami taati) yang sudah terbentuk dan melekat kini berubah menjadi *sami`na wa analisa* (kami dengar dan kamianalisa) yang menyebabkan masyarakat Pamekasan mulai berfikir rasional serta telah memiliki pilihan politik sendiri.

Bertolak dari uraian latar belakang masalah diatas, maka Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap suatu persoalan "Mengapa Kekuasaan Kyai Sepuh menurun dalam Pilkada Pamekasan Tahun 2013?" Sehingga, dari permasalahan tersebut, maka pentingnya dilakukan penelitian ini bertujuan untuk ; (1) Mengetahui dan menjelaskan tentang menurunnya kekuasaan kyai sepuh dalam proses demokratisasi lokal pilkada Pamekasan tahun 2013. Diuraikan dengan melihat kuasa kyai sepuh dalam ranah politik pilkada Pamekasan dari periode ke periode. (2) Diharapkan mampu memberikan manfaat serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan sosial politik terutama berkaitan dengan hegemoni kekuasaan dalam pilkada.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan *case study* sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pudarnya dominasi tersebut. Untuk mendapatkan data-data tentang kuasa hegemonik kyai sepuh tersebut, penulis memanfaatkan wawancara mendalam dengan informan kunci dalam pilkada Pamekasan 2013. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dan studi pustaka terhadap yang berkaitan dengan kyai dan data-data pilkada Pamekasan yang diperoleh tersebut membantu menjelaskan mengenai dinamika kuasa kyai sepuh sebagaimana yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini.

Disamping itu, dilakukan juga analisa terhadap kelebihan dan kekurangan dari data-data yang didapat. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pamekasan Madura. Unit analisis penelitian ini adalah para masyarakat pada pilkada Pamekasan tahun 2013. Data-data yang didapat dikumpulkan dan diklasifikasi sesuai dengan pengorganisasian data dengan berpedoman pada pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini. Setiap data yang diperoleh diorganisasikan



sehingga dapat membantu menjelaskan dan menguraikan dalam melakukan analisis. Dalam membangun interpretasi atas informasi dan data yang didapat selama penelitian dilakukan, penulis mencoba mengecek dengan cara membandingkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai pihak terhadap objek penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada langsung) Pamekasan tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2013 yang diikuti oleh 3 pasangan kandidat bupati dan wakil bupati. Pasangan cabub dan cawabub dengan nomor urutan *pertama* yaitu Anwari dan Holil yang dikenal dengan nama "AHO". Pasangan yang *kedua* yaitu Drs. K. H. Kholilurrahman, SH. M. Si dan Ir. H. Mohammad Masduki yang dikenal dengan nama "KOMPAK". K.H. Kholilurrahman berlatar belakang kyai dan merupakan kandidat yang tercatat sebagai *incumbent* bupati Pamekasan periode 2008-2013. Pasangan yang *ketiga* yaitu Ahmad Syafi'i dan Khalil Asy'ari yang dikenal dengan nama "ASRI" dan sekaligus sebagai pasangan yang memenangkan pilkada untuk memimpin kabupaten Pamekasan periode 2013- 2018. Masing-masing pasangan memiliki jargon dan gerakan politik yang berbeda-beda. Bahkan, latar belakang kandidat juga beragam, ada yang berlatar belakang kyai, birokrat, politisi dan mantan santri (alumni pesantren) serta pengusaha.

Disamping itu juga terdapat kandidat yang tercatat sebagai *incumbent*, yaitu K. H. Kholilurrahman sebagai kepala daerah (bupati) Pamekasan periode 2008-2013. Adapun kandidat nomor urut pertama merupakan pendatang baru dalam konteks politik lokal Pamekasan yang mencoba untuk berpartisipasi dalam dunia politik praktis proses demokratisasi lokal.

Pilkada Pamekasan tahun 2013 dilaksanakan serentak di 1.582 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di berbagai desa tiap kecamatan. Dengan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih yaitu 642.808 orang. Sebagai elit dalam masyarakat, para kandidat mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam penegakan demokratisasi lokal di Pamekasan. Mereka berpartisipasi dalam pencalonan calon bupati dan calon wakil bupati dengan tujuan untuk mewujudkan pendidikan politik lokal di Pamekasan. Pilkada merupakan pendidikan politik bagi masyarakat Pamekasan.

Adapun rincian perolehan suara masing-masing calon yang terbagi dalam setiap kecamatan yang ada di Pamekasan adalah sebagai Berikut

Tabel 1.5 Perolehan Suara Masing-masing Pasangan dalam Pilkada Kabupaten Pamekasan 9 Januari 2013 (Sumber ; KPU Kabupaten Pamekasan, 2013)

AHO		KOMPAK		ASRI	
Kecamatan	Suara	Kecamatan	Suara	Kecamatan	Suara
Tlanakan	616	Tlanakan	14.602	Tlanakan	17.295
Pademawu	905	Pademawu	15.742	Pademawu	31.312
Galis	318	Galis	7.047	Galis	11.042
Larangan	582	Larangan	13.131	Larangan	19.945



Pamekasan	1.167	Pamekasan	12.871	Pamekasan	35.931
Proppo	660	Proppo	20.494	Proppo	21.867
Palengaan	454	Palengaan	24.137	Palengaan	23.638
Pegantenan	308	Pegantenan	18.984	Pegantenan	17.691
Kadur	343	Kadur	13.573	Kadur	13.175
Pakong	232	Pakong	8.921	Pakong	11.804
Waru	304	Waru	15.132	Waru	17.413
Batu Marmar	475	Batu Marmar	25.627	Batu Marmar	14.911
Pasean	541	Pasean	15.641	Pasean	14.330
Total	6.905	Total	205.336	Total	250.336

Sumber ; KPU Kabupaten Pamekasan, 2013

Kemenangan Ahmad Syafii dalam mengalahkan K. H. Kholilurrahman meruntuhkan sikap paternalistik yang melekat pada masyarakat Pamekasan serta menjadi sejarah baru dalam dinamika politik lokal Pamekasan. K. H. Kholilurrahman merupakan kandidat yang di unggulkan dalam pilkada Pamekasan 2013. Karena selain berlatar belakang kyai ia juga didukung oleh kyai sepuh dan beberapa kyai ternama di Pamekasan justru kalah oleh kandidat yang tidak di dukung oleh kyai sepuh dan mayoritas kyai di Pamekasan.

Dalam setiap pemilihan, masyarakat Pamekasan pada umumnya selalu mengikuti perintah dan petunjuk serta pilihan politik kyai serta kandidat yang di dukung oleh kyai (lebih-lebih kyai sepuh) sudah bisa dipastikan memenangkan pemilihan. Karena Para Kyai di Pamekasan memiliki basis dukungan yang sangat kuat yang notabene adalah para santri- santrinya baik yang masih tinggal dipesantren maupun yang sudah keluar dari pesantren yang sudah menjadi alumninya. Dalam memperoleh dukungan dari pengikutnya, elit kyai ini seringkali menggunakan dalil-dalil agama yang berasal dari al-quran dan al-hadits yang merupakan sumber-sumber ajaran agama Islam. Kefanatikan masyarakat Pamekasan pada sosok dan figur seorang kyai dan pesantrennya serta pada ajaran-ajaran agama islam dapat dimanfaatkan oleh para elit kyai ini, karena para elit kyai ini dipandang oleh pengikutnya sebagai elit agama yang sangat berpengaruh guna menciptakan suatu keputusan demi kemaslahatan umat didalam kehidupan masyarakat.

Dari kajian yang dilakukan terhadap dinamika Kekuasaan Kyai dalam proses demokratisasi lokal Pamekasan 2013 diperoleh hasil (temuan) sebagai berikut. *Pertama* besarnya pengaruh kyai yang melebihi pengaruh Partai Politik (parpol). Status kyai sebagai bangsawan yang dikenal sebagai orang yang memahami agama yang dekat dengan tuhan memiliki kuasa yang sangat dominan dan dihormati di Madura khususnya Pamekasan. Sehingga dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat beliau menjadi preferensi masyarakat. Preferensi tersebut tertanam dalam keyakinan masyarakat sejak lama dari zaman penjajahan, sebelum kemerdekaan hingga akhir-akhir ini. Dalam kehidupan sosial masyarakat Pamekasan terdapat sosok yang sangat ditaati dan dipatuhi yang dikenal dengan kyai sepuh. Selain sebagai panutan dalam kehidupan masyarakat, beliau juga menjadi corong dan muara dari semua pesantren yang ada di



Pamekasan.

Kedua persaingan antar kyai dalam proses demokratisasi lokal 2013. Pilkada Pamekasan 2013 merupakan ujung dari kuasa hegemonik kyai sepuh dalam ranah politik. Kedudukan, status dan kekuasaannya mulai dipertanyakan seiring dengan munculnya perilaku-perilaku politik yang dilakukan oleh kandidat yang didukung oleh beliau, tindakan politik tersebut kurang maupun tidak mendapatkan simpati masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kyai sepuh tidak bisa mempertahankan *doxa* yang selama ini membingkai kyai dengan kuasanya sebagai bangsawan dan orang suci yang dekat dengan tuhan. Sehingga wacana-wacana yang selama ini berkembang dan menjadi pegangan masyarakat Pamekasan mulai memudar seiring munculnya wacana-wacana baru dalam politik yang mampu menyingkirkan *doxa* lama yang sudah tertana yang menyebabkan pilihan politik kyai bukan lagi pilihan politik masyarakat dalam pilkada Pamekasan 2013.

Ketiga pergeseran pengaruh kyai. Pertarungan antara kyai sepuh dengan kompetitornya didalam pilkada baik melalui wacana politik, agama, budaya, masyarakat mampu menggeser wacana-wacana yang sudah menjadi *doxa* dalam kehidupan Masyarakat Pamekasan. Melalui *heterodoxa* mampu menggeser *doxa* lama dalam pertarungan di arena (arena politik kultural simbolis). Sehingga pilkada Pamekasan 2013 yang didukung oleh kyai sepuh sebagai aktor yang hegemonik melalui wacana-wacana dan modal yang dimiliki oleh mereka ternyata mampu dikalahkan oleh wacana dan modal yang dikembangkan oleh masyarakat sebagai kompetitor yang berdampak pada terbentuknya *habitus* dan *doxa* baru.

Kyai sepuh merupakan salah satu tokoh dan elit lokal didalam kehidupan masyarakat Pamekasan. Beliau merupakan keturunan bangsawan yang dikenal sebagai orang yang faham terhadap Agama Islam serta dikenal dekat dengan tuhan yang memiliki kwalat dan sebagainya. Dengan menyandang status sebagai *waratsatul anbiya* (pewaris para nabi), beliau diyakini sebagai orang suci, hal tersebut membentuk sebuah *doxa* yang membentuk *habitus* dalam kehidupan sosial masyarakat Pamekasan. Dengan *doxa* dan *habitus* yang melekat tersebut, hingga akhirnya menjadikan kyai sepuh sebagai sosok yang hegemonik dan paling berpengaruh dalam semua ranah kehidupan.

Dalam pilkada Pamekasan 2013, masyarakat Pamekasan yang sebelumnya satu kesatuan dengan kyai sepuh dan kyai kini berubah menjadi aktor dan tampil sebagai kompetitor yang mampu membangun gagasan perlawanan (*heterodoxa*) untuk mengkritisi keberadaan kyai dalam politik, dengan menggunakan modal politik yang ia miliki untuk melakukan perubahan terhadap *doxa* yang mereka yakini selama ini.

Kyai sepuh dan masyarakat Pamekasan yang mengidentikkan sebagai santri pada awalnya merupakan satu kesatuan entitas yang tidak dapat dipisahkan, kini menjadi entitas yang berdiri sendiri seiring. Pencalonan Achmad Syafii sebagai kompetitor kyai sepuh dalam pilkada merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap tindakan-tindakan diskursif yang dilakukan oleh kyai. Baik pada saat memimpin Pamekasan sebagai kepala daerah (bupati) maupun pada saat



pencalonan dalam pilkada Pamekasan 2013. Tindakan diskursif tersebut mengundang pihak untuk mengkritisi melalui pewacanaan. Pewacanaan melalui *heterodoxa* sebagai senjata untuk melawan *orthodoxa* yang terus mempertahankan sebuah *doxa* yang telah lama terbentuk.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak selalu berhubungan dengan nalar rasional, tetapi bisa juga karena spontanitas reaksi dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah. Perlawanan tersebut, sebagaimana Bourdieu menggugat tata kebiasaan yang kita lakoni. Kebiasaan itu tidak selalu berhubungan dengan nalar rasional tetapi juga menampilkan spontanitas reaksi terhadap suatu situasi. Serta kebiasaan juga berhubungan dengan ketidaksetaraan dalam sosial masyarakat berdasarkan kekuasaan maupun kelas sosial. Disisi lain, hal tersebut sebagai bentuk transformasi dalam struktur sosial Pamekasan dimana telah terjadi perubahan *doxa* yang selama ini berkembang, bahkan sudah bertahun-tahun mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Pamekasan.

Habitus dan Doxa ; Kuasa Hegemonik Kyai Sepuh Dalam Proses Demokratisasi Lokal Pamekasan

Perubahan struktur politik Indonesia dari otoritarianisme menuju demokratisasi yang terjadi 1998 memberikan peluang kepada setiap warga negara untuk berekspresi dan berpartisipasi aktif dalam politik dan lembaga pemerintahan. Dalam hal ini tidak terkecuali kyai sebagai salah satu elit masyarakat khususnya di Jawa dan Madura yang dikenal sebagai pemegang otoritas keagamaan yang diyakini sebagai orang yang suci (pewaris nabi).

Dalam politik Indonesia kontemporer, jika ditilik dari karakteristik pesantren yang merupakan pelembagaan pendidikan keislaman, sesungguhnya keterlibatan pimpinan pesantren dalam politik merupakan sesuatu yang dapat dimengerti. Dari sini kita mendapatkan asumsi dasar yang melatarbelakangi keikutsertaan para kyai dalam kancah politik praktis, yakni bahwa pada dasarnya Islam juga mencakup ajaran untuk bernegara, serta posisi pesantren termasuk dalam hal ini, peran kyai sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan umat, termasuk diantaranya pendidikan politik kewarganegaraan. (Khoirudin 69 ; 2005)

Seiring berjalannya waktu, perubahan peta politik yang terjadi di Indonesia dengan ditandai oleh runtuhnya Orde Baru yang menerapkan sistem politik otoritarian dan sentralistik berubah menjadi desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Perubahan era ini antara lain ditandai dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pada titik inilah sosok pimpinan pesantren menemukan peluang dan aksesnya untuk menjadi *umara`* (pemimpin). Pelaksanaan pemilukada langsung merupakan suatu proses politik memilih kepala daerah (bupati) secara langsung sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Ketika ruang politik dibuka pada jaman reformasi, banyak tokoh kyai tampil dalam gelanggang politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung telah memberikan harapan dan peluang bagi daerah itu sendiri sekaligus kepada rakyat untuk dapat mengekspresikan diri. Artinya



daerah diberi peluang memunculkan tokoh lokal tidak terkecuali pada kyai yang mempunyai kharisma ikut mengambil bagian dengan aktif di ranah politik (Nurul Azizah 5 ; 2013).

Di Madura terdapat 3 (tiga) kepala daerah (bupati) yang berlatar belakang kyai. yakni, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Berikut adalah para kepala daerah (bupati) yang berlatar belakang kyai.

Tabel 3.1 Kepala Daerah (Bupati) yang Berasal dari Kyai

Kabupaten	Nama Bupati	Lembaga Pendidikan	Riwayat Jabatan dan Organisasi
Bangkalan	KH. R. Fuad Imron Amin	Pondok Pesantren "Syaichona Kholil" Kabupaten Bangkalan di asuh oleh Abdullah Sachall, cucu pendiri NU yang juga kerabat dekat dari KH. R. Fuad Amin	1. Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Bangkalan 2. Ketua Dewan Syuro PKB Propinsi Jawa Timur 3. Anggota FPP DPRD Bangkalan periode 1992-1997 4. Anggota FKB PR/MPRRI periode 1999-2004
Pamekasan	Drs. KH. Kholilurrahman, M. Si	Pengasuh Pondok Pesantren "Matssaratul Huda" Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan	1. Ketua PC. NU kabupaten Pamekasan 2. Anggota FKB DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004
Sumenep	1. KH. Ramdhan Siroj, SE. MM 2. Drs. KH. Busro Karim, Msi	1. Pengasuh Pondok Pesantren "Nurul Islam" Desa Karang Cempaka kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep 2. Pengasuh Pondok	1. Ketua PC NU kabupaten Sumenep 2. Ketua Dewan Syuro DPC PKB kabupaten Sumenep 3. Anggota FKB DPRD kabupaten Sumenep periode 1999-2004 1. Ketua Tanfidz NU 2. Ketua DPRD



		Pesantren "Al-Karimiyah" BarejiGapura kabupaten Sumenep	kabupaten Sumenep dua Periode
--	--	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Dalam politik, kyai selaku pimpinan dan pengasuh pesantren memiliki basis dukungan yang tetap yaitu para santrinya di masyarakat. Ia akan selalu menghormati, memuliakan dan akan selalu mematuhi pemerintahnya. Hal tersebut sebagai modal untuk terlibat dalam kegiatan politik baik secara langsung sebagai pemain politik (*political player*) dan menjadi pemimpin politik (*elective-political leader*) karena ia memiliki posisi tawar (*bergaining position*) yang kuat dan menentukan dalam proses politik (Sidik Jatmika ; 2005.). Salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan tersebut adalah dengan cara mengikuti perintah dan permintaan sang kyai (Zamakhsyari Dhofier ; 1982). Kyai merupakan aktor yang menentukan dalam kehidupan masyarakat. Terutama masyarakat Pamekasan pinggiran yang masih kental dengan tradisi tradisionalnya, sering kali faktor dukungan kyai menjadi penentu kemenangan dalam setiap pesta demokrasi di Pamekasan Madura.

Kemenangan Achmad Syafii pada tahun 2003 sebelum diberlakukannya pilkada langsung serta kemenangan K. H. Kholilurrahman dalam pilkada Pamekasan 2008 yang mengantarkannya menjadi kepala daerah (Bupati) Pamekasan merupakan berkat peran besar dan dukungan kyai sepuh. Posisi kyai sepuh sangat kuat dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Pamekasan. Ketokohnya yang terpandang dan dimulyakan membuat masyarakat Pamekasan tidak bisa mengelak, menolak dan berpaling darinya. Salah satu faktor yang membuatnya sangat terpandang, diperhitungkan hingga mempinyai kuasa yang kuat dalam masyarakat adalah faktor keberadaan pesantren itu sendiri.

Masyarakat Pamekasan memandang kyai sepuh sebagai corong dan induk bagi semua pesantren di Pamekasan serta menjadi referensi bagi masyarakat Pamekasan pada umumnya. Selain itu, kemenangan K. H. Kholilurrahman pada pilkada 2008 juga tidak terlepas dari sosok pribadi K. H. Kholilurrahman sebagai pimpinan dan pengasuh pondok pesantren yang ia asuh di pondok pesantren "Matssaratul Huda" Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Dalam ranah politik, kyai sepuh bukan merupakan pendatang baru. Dengan kedudukan sebagai sesepuh dan terkenal ia merupakan aktor dan pemain lama yang sering kali menjadi faktor penentu dalam proses pemilihan (pemilu maupun



pilkada) di Pamekasan. Bukan hanya itu, seringkali ia juga sebagai aktor yang menentukan dalam proses pengambilan dan penetapan kebijakan pemerintah Pamekasan. Sebelumnya, pada pemilihan kepala daerah (bupati) Pamekasan tahun 2003, kedua pesantren tersebut mendukung Achmad Syafii dan sukses mengantarkannya duduk menjadi kepala daerah (bupati) Pamekasan periode 2003- 2008 dengan memenangkan pemilihan mengalahkan *incumbent* Dwiatmo.

Secara politis, keterlibatan kyai dalam politik boleh saja, dengan mencalonkan kyai maupun bukan kyai sebagai kepala daerah (Bupati). Meski dalam perspektif kultur orang Madura munculnya bupati kyai seakan menyimpang dari koridor filosofi orang Madura. Karena sampai saat ini, masyarakat Madura tidak akan pernah melepaskan ungkapan *Buppa`- Bhabhu`*, *Ghuru*, *Ratoh* sebagai landasan kehidupan sehari-hari mereka. (A. Latief Wiyata, *Seorang Antropolog Budaya Madura Universitas Jember*, dalam <http://www.wiyata.com>).

Selain orang tua (*Buppa`-Bhabhu`*) yang menjadi panutan utama, menyusul figur kyai (*Ghuru*), kemudian pemimpin formal (*Ratoh*). Tugas dan kewajiban utama seorang kyai idealnya penjaga moral setiap orang. Karenanya, tugas dan kewajiban ini lebih ditekankan pada kehidupan ukhrowi (*sacred life*). Sedangkan figure *Ratoh* dalam tatanan praksis bermakna sebagai pemimpin formal yang tugas dan kewajibannya lebih berorientasi pada kehidupan duniawi (*profane life*). Munculnya bupati kyai akan dipandang sebagai penyimpangan dari koridor filosofi kehidupan orang Madura oleh karenanya, secara kultural sudah tegas ditentukan antara bidang kehidupan yang menjadi ranah otoritas kyai (*Ghuru*) dan ranah kekuasaan bupati (*Ratoh*). Dalam ungkapan lain dengan jelas dihadapkan agar kedua figure itu menempati posisi sesuai dengan otoritasnya (*lakona lakone, kennenganna kennenge*) (Latief Wiyata ; 2005).

Mengutip Imam Suprayogo, sedikitnya ada tiga alasan mengapa kyai pimpinan pesantren terlibat kedalam aktivitas politik. *Pertama* bahwa sumber ajaran Islam memiliki lingkup tak terbatas pada aspek ritual dan bimbingan moral, melainkan juga memberikan nilai-nilai pada semua sisi kehidupan baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial dan juga menyangkut persoalan politik. *Kedua* dengan posisinya sebagai pemuka (elit) agama, ia memiliki pengikut dan pengaruh yang luas ditengah-tengah masyarakat. Hal itu menyebabkan kyai terlibat kedalam persoalan pengambilan keputusan bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian masalah sosial, pengembangan pendidikan dan ekonomi. *Ketiga* dari sisi sejarahnya, kyai memiliki peran yang cukup besar didalam politik, hal tersebut bisa dilihat dalam pergolakan melawan penjajah hingga beberapa masa kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan. (Imam Suprayogo ; 1998)

Disisi lain, keterlibatannya kedalam dunia politik untuk menjaga eksistensi pesantren yang ia asuh. Dengan keterlibatan pimpinan pesantren dalam proses politik maupun dalam jabatan struktural di pemerintahan ia akan mudah untuk mendapatkan akses bantuan dalam memajukan dan mengelola pendidikan pesantren. Bagi para politisi maupun para petinggi partai politik, keterlibatan kyai merupakan angin segar. Pesantren sebagai basis massa yang potensial merupakan



daya tari yang banyak diperhitungkan oleh kelompok-kelompok kepentingan politik. Realitas politik seperti itu, membuat posisi kyai menjadi amat penting.

Fatwa-fatwa kyai menjadi simbol politisasi dikalangan pesantren. Apapun yang difatwakan kyai merupakan gambaran dan kecenderungan kearah mana aspirasi politik santri akan disalurkan. Diamnya seorang kyai, dengan begitu dapat menimbulkan implikasi politis karena perilaku kyai yang teramati dan tidak teramati merupakan bagian dari simbol politik kyai. (Khoirudin 118 ; 2005).

Elektabilitas Kyai dan Kekalahan Kandidat yang di Dukung ; Indikasi Pudarnya Dominasi Politik Kyai Sepuh dalam Proses Demokratisasi Lokal Pilkada Pamekasan 2013

Pertemuan antara *Doxa* dan *Heterodoxa* seringkali tidak terbendung dalam sebuah kontestasi untuk memperebutkan kekuasaan. Dengan menghadirkan gesekan antara berbagai ranah yang dimiliki oleh kyai sepuh baik posisinya sebagai tokoh agama maupun sebagai *political player* atau *political man* dengan berbagai modal yang melekat.

Selama ini Posisi kyai baik posisinya sebagai aktor (agama) maupun posisinya dalam kegiatan di ranah politik dikenal untuk memperjuangkan perubahan demi aktualisasi nilai- nilai agama. Dengan berbagai tindakan yang dinilai selalu memiliki signifikansi terhadap kehidupan agama dan sosial masyarakat Pamekasan. Namun disisi lain besarnya pengaruh kyai dalam kehidupan masyarakat membuat ia mendisposisikan dirinya dalam kegiatan politik praktis dengan harapan mendapatkan posisi strategis dalam kekuasaan politik seperti kepala daerah (bupati). Fenomena tersebut terjadi dalam pilkada Pamekasan 2008 dan 2013.

Pilkada Pamekasan pada tahun 2008 merupakan awal dan pertama kalinya kepala daerah (bupati) dipilih langsung oleh masyarakat Pamekasan. Serta juga merupakan awal keterlibatan sang kyai dalam politik praktis langsung mencalonkan diri sebagai kepala daerah (bupati) Pamekasan dengan dukungan kyai sepuh. Pencalonan kyai dalam pilkada Pamekasan tidak menutup kemungkinan akan menjadi lawan politik (kompetitor) dari kandidat yang sebelumnya merupakan satu komunitas dan satu kesatuan entitas yang tidak dapat dipisahkan yaitu masyarakat sebagai santri dan pengikutnya. Pada pilkada Pamekasan 2008, K. H. Kholilurrahman hadir sebagai kandidat yang berlatar belakang kyai dan didukung oleh kyai sepuh dalam hasil akhir pemilihan keluar sebagai pemenang dengan memperoleh suara 228.736 dengan mengalahkan kandidat *incumbent* Ahmad Syafii (tanpa dukungan kyai sepuh) yang hanya mendapatkan suara 170.080 (Sumber : KPUD Kabupaten Pamekasan).

Kemenangan tersebut tidak lepas dari status kandidat sebagai kyai didalam masyarakat yang memperoleh restu dan dukungan kyai sepuh serta dari para kyai di Pamekasan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pesantren sudah menjadi kantong massa calon tertentu yang sangat diperhitungkan keberadaannya. Institusi pendidikan yang kental dengan nilai-nilai tradisional dan islam "disulap" menjadi suatu institusi yang kental dengan nuansa politik (Imam Zamroni ; 2008).



Keterlibatan kyai didalam politik berdasarkan pada niatan untuk mendakwahkan ajaran-ajaran Islam, tetapi disisi lain terkadang kepentingan ekonomi dan lompatan karir pribadi sering menjadi dominan (Muhibbin 129 ; 2012). Disini terjadi semacam pertarungan kredibilitas dalam kancah politik, apakah kyai akan selalu berpihak pada kepentingan umat ataukah malah sebaliknya, ia akan lebih mengutamakan dirinya, keluarganya maupun kelompok dan golongannya.

Hal tersebut terjadi didalam kehidupan sosial politik Pamekasan dan mengundang perhatian serta penilaian masyarakat terkait dengan ketokohan kyai didalam kehidupan sosial masyarakat maupun kehidupan sosial politik. Menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mendalami tentang persepsi dan pandangan serta evaluasi masyarakat Pamekasan terhadap ketokohan dan karir kyai didalam politik. Dalam hal ini penulis menyebarkan kuisisioner kepada masyarakat Pamekasan diharapkan bisa memberikan penilaian terhadap ketokohan kyai. Quisioner ini disebar pada masing-masing kecamatan (13 Kecamatan) yang diwakili oleh 100 orang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat.

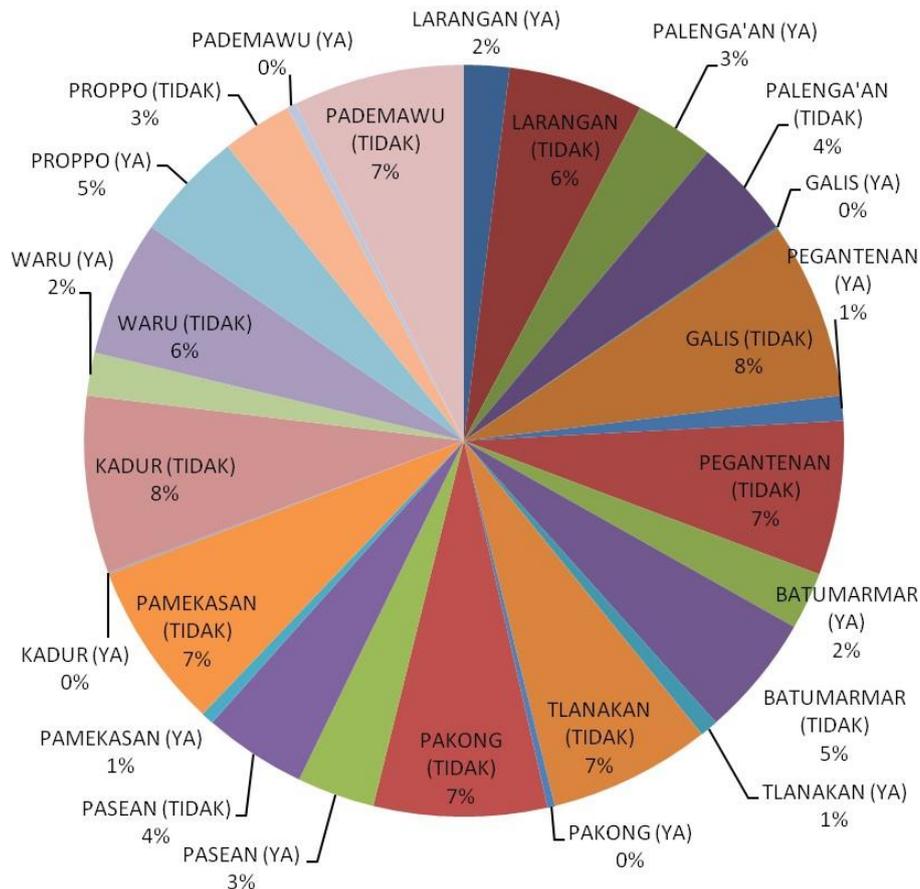
Tabel 4. 2. Penilaian masayrakat Pamekasan terhadap ketokohan kyai

NO	KECAMATAN	Tokoh Semua Lini Kehidupan		Tokoh Agama		Tokoh Sosial Masyarakat		Tokoh Politik	
		(YA)	(TIDAK)	(YA)	(TIDAK)	(YA)	(TIDAK)	(YA)	(TIDAK)
1	LARANGAN	69	31	90	10	43	57	25	75
2	PALENGA'AN	0	100	0	100	100	0	44	56
3	GALIS	1	99	100	0	17	83	1	99
4	PEGANTENAN	84	16	100	0	88	12	14	86
5	BATUMARMAR	37	63	90	10	83	17	32	68
6	TLANAKAN	52	48	93	7	79	21	10	90
7	PAKONG	90	10	100	0	95	5	4	96
8	PASEAN	72	28	93	7	93	7	43	57
9	PAMEKASAN	33	67	91	9	78	22	7	93
10	KADUR	100	0	100	0	99	1	1	99
11	WARU	77	23	96	4	84	16	24	76
12	PROPO	4	96	100	0	93	7	61	39
13	PADEMAWU	41	59	100	0	41	59	5	95

Yang menjadi indikator dalam kaitannya dengan kajian ini adalah kyai sebagai tokoh politik. Tabel tersebut menunjukkan bahwa, dari total keseluruhan Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari 13 Kecamatan mayoritas masyarakat Pamekasan tidak setuju jika kyai terjun kedalam politik praktis serta kyai bukan panutan didalam kehidupan politik mereka yang menandakan bahwa pilihan politik masyarakat Pamekasan tidak mengikuti dan tidak tergantung pada pilihan politik kyai. Jika di Presentasekan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Tabel presentase penilaian masyarakat Pamekasan terhadap ketokohan kyai dalam politik

Tokoh Politik



Salah satu alasan mengapa kyai bukan tokoh politik panutan masyarakat Pamekasan adalah karena Keterlibatan kyai dalam dunia politik di Pamekasan tidak selalu menguntungkan umat (sebagai masyarakat Pamekasan) dan seringkali tidak menunjukkan keberpihakannya kepada umat (sebagai masyarakat Pamekasan). Artinya meskipun kyai terjun kedalam kegiatan politik yang nota bene merupakan guru masyarakat Pamekasan, masyarakat tidak merasakan dampak yang signifikan, karena pada kenyataannya ia hanya mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat Pamekasan.

"... Kyai terjun dalam politik boleh saja, namun ia harus bisa mengakui bahwa dirinya adalah milik semua masyarakat. Artinya, ia harus berjanji bahwa dengan ia terlibat dalam politik di pemerintahan maka akan ada perubahan yang lebih baik, akan mensejahterakan masyarakat secara umum yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Karena rata-rata kyai masih dan



hanya peduli pada lingkungan dan pengikut mereka sendiri ...”¹

“... Keterlibatan kyai dalam politik tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, malah lebih baik ia kembali ke pondok. Karena bagi masyarakat sejauh ini tidak ada bedanya politik di pimpin oleh kyai atau dipimpin oleh non kyai, malah lebih bagus dan lebih baik dipimpin oleh non kyai biar tidak menodai status dan kedudukannya sebagai kyai...”²

Berbagai pandangan yang muncul dari diri masyarakat sebagai informan diatas lebih bermakna ketidaksetujuan masyarakat terhadap kyai yang terjun kedalam politik praktis. Pandangan informan tersebut diatas justru bersifat kritikan dan gugatan. Karena keterlibatan kyai di politik pada umumnya tidak berpihak pada upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Pamekasan pada umumnya. Meskipun ada kesan berpihak pada masyarakat, tetapi pada kenyataannya tidak bahkan justru masyarakat tidak merasakan adanya perubahan.

“... Yang mereka perjuangkan adalah kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya misalnya, contoh simpelnya adalah tentang pengaspalan jalan. Hanya jalan yang akan dilewatinya, dilewati keluarga dan kelompoknya saja yang diaspal. Belum lagi masalah kepentingan pondok pesantrennya dan penempatan jabatan strategis bagi keluarga dan pendukungnya ...”³⁴

Peran kyai sepuh serta para kyai yang besar dalam kehidupan masyarakat yang menjadikannya panutan tidak jarang juga menjadi sorotan dan kritikan atas tindakan dan kebijakan didalam pemerintahan yang ia pimpin dalam dunia politik praktis. Dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan politik yang pada akhirnya mengurangi peran kekeayaannya sebagai pewaris para nabi. Dimana kyai bukan lagi milik umat secara keseluruhan tetapi sudah terlibat kedalam kelompok kepentingan yang ada didalam masyarakat yang menyebabkan ketundukan dan kepatuhan terhadap kyai yang tertanam dalam kehidupan dan kepribadian masyarakat mulai mengalami perubahan. Masyarakat Pamekasan tidak lagi terdominasi oleh kekuatan dan kekuasaan politik kyai sepuh serta tidak lagi patuh, tunduk dan mendukung atas apa yang di kehendaki dan dilakukan. Paradigma *sami`na wa atho`na* yang sudah terbentuk dan melekat kini berubah menjadi *sami`na wa analisa* yang menyebabkan ia mulai berfikir rasional serta telah memiliki pilihan politik sendiri.

Fatwa-fatwa politik sang kyai sepuh yang sebelumnya mujarab kini mulai pudar seiring adanya sorotan dan kritikan terhadap kinerja kandidat yang

¹ Wawancara dengan Nurul Yaqin santri Mambaul Ulum Bata-bata Minggu 2 Maret 2014 di Pesantren

² Wawancara dengan Helmi santri Pondok Pesantren Sumber Bungur Pakong Pamekasan Sabtu 1 Maret 2014 di Pesantren

³ Wawancara Bahri santri Pondok Pesantren Sumber Bungur Pakong Pamekasan Sabtu 1 Maret 2014 di Pesantren



berlatar kyai didalam pemerintahan. Tidak jarang sorotan dan kritikan tersebut lahir dari aktor yang sebelumnya sangat dekat taat, tunduk, patuh bahkan sangat mengagumi terhadap sosok kyai yaitu masyarakat santri. Masyarakat santri menjadi aktor politik yang lahir dari dalam rahim kyai ditengah masyarakat Pamekasan yang paternalistik, yang mampu membangun gagasan (sebagai *heterodoxa*) yang menyebabkan ia memperoleh dukungan dan simpati masyarakat Pamekasan.

Hadirnya aktor kompetitor kyai kedalam politik praktis merupakan suatu tuntutan tersendiri untuk memperbaiki tata kehidupan sosial masyarakat Pamekasan serta dorongan moral dalam diri masyarakat khususnya santri sebagai elemen pesantren untuk mengembalikan kyai kedalam dunia pesantren dengan predikat awal sebagai *waratsatul anbiya`* (pewaris para nabi). Hal tersebut kembali tercermin dalam fenomena pilkada Pamekasan 2013. Namun, perbedaan dengan pilkada Pamekasan 2008, adalah pada pilkada 2013 ini kandidat bupati dan wakil bupati dimana status sebagai *incumbent* dan berlatar belakang kyai kurang mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat.

Perubahan paradigma dari yang sebelumnya merupakan satu kesatuan entitas dan tidak bisa dipisahkan, kini menjadi lebih tajam ketika *track record* kyai dalam keterlibatannya didalam politik praktis sebagai kepala daerah (bupati) dinilai buruk dan mengandung banyak penyimpangan sehingga hubungan kyai dengan masyarakat semakin renggang dan kurang baik. Hal tersebut semakin menggugah hati masyarakat untuk memunculkan kandidat alternatif yang datang dari kalangan non kyai tanpa dukungan dan restu dari kyai sepuh. Pilkada Pamekasan 2013 lagi-lagi merepresentasikan kontestasi kyai dan non kyai dalam politik. hal tersebut kembali di tandai dengan hadirnya calon bupati dari dua latar belakang yang berbeda yang sebelumnya merupakan satu kesatuan yang sudah mengakar di dalam masyarakat dan tidak bisa di pisahkan, yaitu calon kandidat yang didukung oleh kyai sepuh yaitu K. Khalilurrahman (*Incumbent*) dan kandidat yang pernah didukung oleh kyai sepuh yaitu Ahmad Syafi'i.

Masing-masing kandidat sama-sama mengandalkan modal yang ia miliki dengan sama-sama menggunakan berbagai wacana yang di mainkan, namun kandidat yang tidak didukung oleh kyai sepuh dinilai lebih realistis dengan program-program yang ia tawarkan. Kontestasi dalam ajang pilkada Pamekasan 2013 ini sangat menimbulkan hiruk-pikuk dan perpecahan, sehingga membuat kebingungan bagi *grass roots* dalam kehidupan masyarakat Pamekasan karena berubahnya paradigma, santri yang awalnya merupakan bagian dari kyai kini menjadi entitas yang berdiri sendiri dan bahkan menjadi kompetitor kyai (tidak mengikuti pilihan politik kyai sepuh) dalam pilkada dengan berujung pada kekalahan kandidat yang didukung oleh kyai sepuh.

Kemunculan calon bupati dari tanpa dukungan kyai sepuh yang hegemonik serta selalu mendominasi dalam setiap pemilihan maupun pilkada tersebut menunjukkan bahwa, *pertama* Masyarakat Pamekasan tidak lagi terdominasi oleh kekuatan dan kekuasaan politik kyai sepuh serta tidak lagi patuh, tunduk dan mendukung atas apa yang di kehendaki dan dilakukan sang kyai. Paradigma *sami'na wa atho'na* yang sudah terbentuk dan melekat kini berubah menjadi



sami'na wa analisa yang menyebabkan masyarakat mulai berfikir rasional serta telah memiliki pilihan politik sendiri. *Kedua* Masyarakat Pamekasan telah memiliki pilihan politik sendiri sebagai bentuk keberaniannya dalam memprotes kebijakan dan kepemimpinan politik kyai sebelumnya yang sedang mendapatkan sorotan dan kritikan dalam kebijakan dan tindakannya yang hanya berafiliasi pada kekuasaan, jabatan, uang maupun materi (proyek).

Setidaknya terdapat tiga alur dalam melihat kekalahan kandidat yang didukung oleh kyai sepuh serta kekalahan tersebut sebagai bentuk perubahan sebuah *habitus* dan *doxa*, kuasa kyai sepuh telah pudar dalam proses demokratisasi lokal di Pamekasan. *Pertama* pewacanaan terhadap tindakan-tindakan sang kandidat yang didukung oleh kyai sepuh. Sang kandidat kyai tampil dalam kegiatan politik dengan tujuan perjuangan dalam menegakkan nilai-nilai keagamaan. Dengan dukungan kyai sepuh ia mampu dan dapat memenangkan dengan mudah kontestasi pemilihan umum melalui wacana-wacana yang ia mainkan dengan modal-modal yang ia miliki. Sebagai elit agama dengan simbol *waratsatul anbiya* yang melekat mampu membius masyarakat Pamekasan untuk taat, tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan disamping mewacanakan kehadiran kyai untuk kemaslahatan umat. Bahkan, praktek inkonstitusional dan anti demokrasi melengkapi pesta pemilihan umum pilkada Pamekasan dengan pewacanaan yang dimainkan jika mengikuti kyai maka akan mendapatkan barokah namun jika tidak mengikuti perintahnya maka ia akan kualat.

Keterlibatan kyai kedalam politik praktis untuk mewujudkan perubahan dan demi aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat nampaknya tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Terbukti dengan kepemimpinan kyai yang didukung oleh kyai sepuh selama satu periode 2008-2013 terjadi banyak penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan kebijakan. Tindakan-tindakan kyai dalam kepemimpinannya mengandung magnet, respon dan reaksi masyarakat yang dengan sendirinya muncul, baik yang pro maupun kontra, sehingga *action* itu menjadi pemicu konflik di kalangan masyarakat. Misalnya poligami yang dilakukan oleh sang kandidat, perekrutan PNS yang dinilai terjadi transaksi jual beli dan Mutasi Jabatan yang dilakukan sewenang-wenang oleh kyai. Tindakan tersebut memicu kegelisahan hingga menimbulkan wacana tandingan dimana tindakan-tindakan kyai tersebut sebagai bentuk dosa besar yang telah dilakukan kyai terhadap Masyarakat Pamekasan.

*"... Ada tiga dosa besar K. H. Kholilurrahman sebagai bupati Pamekasan yang tidak bisa di ampuni oleh Masyarakat Pamekasan. Yaitu Poligami, Jual beli PNS dan Mutasi Jabatan ..."*⁴

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sang bupati kyai tersebut bersifat diskursif itu sebagai bentuk kegelisahannya terhadap sosio-politik yang

⁴ Wawancara Dengan mas Taufan Anggota FPD DPRD Pamekasan Jumat 18. 02. 2014 di Arek Lancor, Alun-alun Pamekasan
Wawancara dengan Al-Anwari Kholil Kandidat no 3, Pilkada Pamekasan Senin 03. 03. 2014 di Kediaman



berkembang dalam kehidupan masyarakat Pamekasan, dimana posisi kyai yang terancam oleh santri sebagai masyarakat Pamekasan. Keterlibatan kyai dalam politik praktis yang nota bene melakukan perubahan demi aktualisasi nilai-nilai keislaman justru mengalami stagnasi bahkan degradasi budaya dan politik.

Kedua stagnasi menyebabkan elektabilitas kandidat yang didukung oleh kyai sepuh dalam politik menurun. Keterlibatan kyai dalam politik praktis dengan dalih untuk mewujudkan perubahan demi aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat Pamekasan. Namun alih-alih mewujudkan perubahan, Keterlibatan kyai kedalam politik praktis membawa perubahan yang signifikan. Ia mulai terjebak kedalam pragmatisme politik dan kelompok kepentingan dimana kyai bukan milik umat sebagaimana sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan yang tidak memihak masyarakat (umat) melalui tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh kyai dalam kepemimpinannya. Dalam konteks proses demokratisasi lokal Pamekasan, terpilihnya K. H. Kholilurrahman periode 2008-2013 dengan menduduki jabatan sebagai Bupati (kepala daerah) Pamekasan membawa persepsi yang beragam dalam diri masyarakat atas kinerja sang kyai yang bertransformasi sebagai bupati (kepala daerah). Masyarakat Pamekasan menilai terdapat banyak penyelewengan didalam tindakan politik dan kinerja dalam kepemimpinan K. H. Kholilurrahman.

Tindakan politik tersebut membawa dampak terhadap hubungan masyarakat terhadap kyai. Hubungan tersebut mengalami perubahan sikap dalam hal perilaku masyarakat. Dampak dari tindakan politik tersebut mengundang polemik didalam masyarakat. Polemik tersebut antara lain adalah masyarakat harus mengkaji ulang langkah-langkah politik yang akan diambilnya. Masyarakat yang sebelumnya taat, tunduk dan patuh terhadap kyai melalui wacana-wacana yang dilontarkan, kini ia mulai berani melawan dengan mengeluarkan wacana tandingan. Masyarakat Pamekasan mulai terbuka dan realistis yang mendorong tumbuhnya sikap radikal dibidang intelektual, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan umat.

Tindakan politik kyai yang bersifat diskursif tersebut menyebabkan kegerahan politik sebagai akibat dari stagnasi politik dan budaya dalam kepemimpinan kyai. Stagnasi memunculkan beragam pandangan dan penilaian masyarakat terkait keterlibatan kyai dalam politik yang berakibat pada menurunnya elektabilitas politik kyai. Data dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Pamekasan tidak setuju terhadap keterlibatan kyai dalam politik praktis karena Keterlibatan kyai dalam dunia politik tidak selalu menguntungkan umat (masyarakat Pamekasan) dan seringkali tidak menunjukkan keberpihakannya kepada umat. Artinya meskipun kyai terjun kedalam kegiatan politik yang nota bene merupakan guru masyarakat Pamekasan, masyarakat tidak merasakan dampak yang signifikan, karena pada kenyataannya ia hanya mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat Pamekasan. Pandangan masyarakat Pamekasan tersebut lebih bermakna pada kritikan sekaligus gugatan terhadap kebijakan dan tindakan politik kyai yang terjebak dalam pragmatism politik.

Ketiga menurunnya elektabilitas politik sang kyai menyebabkan kandidat



yang didukung kalah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan kyai didalam kehidupan masyarakat Pamekasan sangat strategis. Setiap gerak-gerik kehidupan masyarakat selalu dikaitkan dengan keagamaan mereka dan kepada panutan didalam masyarakat. Kyai diposisikan sebagai pewaris para nabi (*waratsatul anbiya`*). Aspek-aspek penting yang telah dilakukan oleh kyai dan masih berlangsung sampai saat ini diantaranya adalah pendidikan, sosial dan dakwah. Bukti nyata ini dapat dilihat dari proses berbagai kegiatan yang berlangsung di pesantren sebagai tempat dimana kyai eksis didalamnya dan masyarakat disekitarnya.(Muhibbin 129 ; 2012).

Ketundukan dan kepatuhan masyarakat Pamekasan terhadap kyai sepuh tidak terbantahkan lagi. Masyarakat Pamekasan dikenal dengan masyarakat yang fanatik terutama terhadap hal-hal berkaitan dengan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Segala aktivitas kesehariannya selalu disandarkan pada nilai-nilai agama dan kepada panutan mereka didalam kehidupan masyarakat. Kyai sepuh merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Pamekasan. Penghormatan, ketaatan, kepatuhan serta ketundukan masyarakat Pamekasan terhadap kyai sepuh melebihi penghormatan terhadap tokoh dan elit lainnya.

Fenomena belakangan terjadi perluasan peran kyai, setidaknya ia memiliki peran ganda. Disatu sisi sebagai tokoh agama (pimpinan dan pengasuh pesantren). Disisi lain ia berperan sebagai figur yang terlibat dalam politik praktis, sebagai aktor. (Achamd Patoni 181; 2007) Kyai terlibat kedalam aktivitas politik praktis sering kali terjerembab kedalam pragmatism politik yang acap kali memiliki implikasi yang tidak selalu menguntungkan.

“... Kepemimpinan kyai sudah terkontaminasi oleh kepentingan pribadi atau kelompoknya dari pada mengutamakan kepentingan rakyat Pamekasan ...”⁵

Fenomena keterlibatan kyai kedalam kegiatan poitik praktis dengan menduduki jabatan struktural dalam politik maupun menjadi pimpinan atau kepala daerah (bupati) seringkali memunculkan gesekan didalam kehidupan masyarakat dan tidak ayal juga terjadi permusuhan dan kekisruhan antar pendapat maupun antar basis massa. disebabkan karena keterlibatan kyai dalam politik dipandang terlalu mengedepankan orientasi politik pribadi dan kelompoknya yang kemudian dikemas dalam bentuk kepentingan kekuasaan. Disisi lain keterlibatan kyai kedalam politik praktis seringkali membawa dampak tradisionalnya dalam dunia pesantren. Tugas kyai yang menjaga *mainstream* paham *ahlussunah wal jamaah* melalui pesantren kini tidak terurus, pesantren yang harusnya dan wajib ia kelola malah ditinggalkan.

Kepemimpinan K. H. Kholilurrahman sebagai kepala darah (bupati) Pamekasan 2008- 2013 yang membawa pesepsi yang beragam dalam diri masyarakat atas kinerja dan tindakan- tindakan yang dilakukan oleh sang kyai. Masyarakat Pamekasan menilai terdapat banyak penyelewengan didalam

⁵ Wawancara K. Ma`mun Tamim Tokoh Masyarakat dan Kyai Pendukung ASRI Senin 10. 3. 2014 di Kediaman



tindakan politik dan kinerja dalam kepemimpinannya. Sebagai koreksi terhadap satu periode kepemimpinan kyai dalam struktur pemerintahan Pamekasan, pada pilkada 2013 masyarakat merindukan sosok pemimpin yang peduli terhadap kepentingan masyarakat Pamekasan secara umum, terutama terhadap pendidikan. Tindakan masyarakat tersebut sebagai buntut kekecewaan terhadap sang kyai yang sebelumnya mereka harapkan bisa memperbaiki situasi dan kondisi serta menjaga menegakkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan di Pamekasan sebagai orang yang suci bebas dari segala intervensi dan segala bentuk kepentingan.

Tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh K. H. Kholilurrahman dan jajarannya yang bersifat diskursif dan berakibat pada menurunnya elektabilitas kyai dalam pilkada Pamekasan 2013. Terbukti dalam pilkada Pamekasan 2013 wacana-wacana yang dilontarkan oleh kyai melalui modal-modal yang dimiliki tidak laku hingga menimbulkan wacana tandingan dari masyarakat beserta dari kandidat non kyai yang berakibat pada kekalahan kandidat yang didukung oleh kyai sepuh dalam pilkada Pamekasan 2013.

Kesimpulan

Pudarnya dominasi kyai sepuh dalam pilkada Pamekasan tahun 2013 disebabkan oleh *Pertama* besarnya pengaruh kyai yang melebihi pengaruh Partai Politik (parpol). Status kyai sebagai bangsawan yang dikenal sebagai orang yang memahami agama yang dekat dengan tuhan memiliki kuasa yang sangat dominan dan dihormati di Madura khususnya Pamekasan. *Kedua* persaingan antara kyai sepuh dan para kyai. *Ketiga* pergeseran pengaruh kyai.

Dukungan dan pilihan kyai sepuh terhadap kandidat dalam pilkada Pamekasan 2013 kurang mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini dikarenakan *pertama*, Pewacanaan kyai sepuh dalam setiap ranah tidak melahirkan sebuah transformasi, namun malah menyebabkan stagnasi politik dan budaya, akibatnya masyarakat harus melakukan koreksi terhadap pilihan politiknya yang berakibat pada ketidakberpihakan pada pilihan politik kyai sepuh.

Kedua, Respon wacana yang dilontarkan oleh kandidat yang tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat baik dalam setiap ranah dengan melalui modal-modal yang ia miliki sehingga mengakibatkan elektabilitas kandidat yang didukung oleh kyai sepuh menurun. *Ketiga*, Kekalahan kandidat yang didukung oleh kyai sepuh dalam pilkada Pamekasan 2013 sebagai akibat dari ketidakmampuan sang kandidat dalam memanfaatkan peluang yang ia miliki, serta karena akibat dari berbagai tindakan-tindakan diskursif yang telah ia lakukan dalam kepemimpinannya sebagai kepala daerah (bupati) Pamekasan periode sebelumnya. Kekalahan kandidat ini sebagai bentuk memudarnya kuasa kyai sepuh dalam ranah politik.

**Daftar Pustaka**

- Azizah, Nurul, *Artikulasi Politik Santri dari Kyai menjadi Bupati*. (Jember : Pustaka Pelajar, 2013)
- Dhofier, Zamakhsyari *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. (Jakarta :LP3ES, 1982)
- Geertz, Clifford, 1983, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (terj. AswabMahasin), Pustaka Jaya, Jakarta
- Horikoshi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : P3M, 1987)
- Khoirudin. *Politik Kyai Polemik Keterlibatan Kyai dalam Politik Praktis*. (Malang : AverroesPress, 2005)
- Latif, Wiyata, *Kemelut Pilkada Sampang Madura* (Yogyakarta : laksbang, 2005)
- Muhibbin *Politik Kiai Vs Politik Rakyat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)
- Muthmainnah *Jembatan Suramadu Respon Ulama terhadap Industrialisasi* (Yogyakarta :LKPSM, 1998)
- Patoni, Achamd, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)
- Suprayogo, Imam, *Kyai dan Politik di Pedesaan, Sebuah Kajian tentang Variasi dan Bentuk Keterlibatan Kiai (Ringkasan Desertasi)*. (Malang : Jurnal STAIN, 1998)
- Wiyata, A. Latief *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta ;LkiS, 2002)
- Jatmika, Sidik, *Kyai dan Politik Lokal : Studi Kasusau Reposisi Politik Kyai NU Kebumen, Jawa Tengah Memanfaatkan Peluang Keterbukaan Partisipasi di Era Reformasi*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005.
- Wiyata, Latief, *Seorang Antropolog Budaya Madura Universitas Jember*, dalam <http://www.wiyata.com>
- Zamroni, Imam *Dinamika Kekuasaan Elit Ekonomi Lokal Pasca Soeharto di Pamekasan – Madura* (Yogyakarta ; Tesis Program Studi Sosiologi Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada)
- Zamroni, Imam *Agama, Etnis dan Politik dalam Panggung Kekuasaan*. 2008